

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum (Tindaon, 2010).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2013: 195).

Penduduk adalah sebagai subjek dan juga objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Demikian sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembangunan suatu daerah harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan penduduknya sehingga seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Maka pembangunan suatu daerah dapat

dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penduduk erat kaitannya dengan tenaga kerja, yang mana jika ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk, maka penduduk yang berada pada usia angkatan kerja harus terserap dengan optimal (Tindaon, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roni Akmal (2010) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat investasi, dan UMP. Variabel PDRB, investasi dan UMP secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB, investasi, dan UMP akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, *ceteris paribus*.

Adanya kesempatan kerja yang tinggi akan menyerap tenaga kerja secara optimal maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik. Pendapatan yang diperoleh masyarakat, dalam bentuk upah yang diberikan di lapangan pekerjaan akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tujuan dari pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai (Alexandi dan Marshafeni, 2013).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, yang selanjutnya semakin dicitkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran,

meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya penyediaan lapangan kerja (Sulistiawati, 2012: 196; Todaro, 2000: 307).

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi masalah penyediaan kesempatan kerja bagi penduduknya, tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting karena peranannya dalam proses produksi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (BPS DIY, 2014).

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Jiwa)**

Kegiatan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Penduduk Berumur >15 Tahun	2.747.466	2.780.459	2.813.088	2.847.754
Angkatan Kerja	1.933.917	1.988.539	1.949.243	2.023.461
Bekerja	1.850.436	1.911.720	1.886.071	1.956.043
Pengangguran	83.481	76.819	63.172	67.418
Bukan Angkatan Kerja	813.549	791.920	863.845	824.293
Sekolah	269.226	280.427	201.760	270.545
Mengurus Rumah Tangga	433.602	404.800	479.109	439.522
Lainnya	110.721	106.693	182.976	114.226

Sumber :BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung bertambah, dari gambar diatas kenaikan jumlah angkatan kerja yang terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 2.023.461 angkatan kerja. Sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2014

dalam angka meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 63.172 menjadi 67.418, hal itu wajar dikarenakan jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Walaupun demikian, jika dirata-rata dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 menunjukkan grafik yang menurun yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini, yang artinya angkatan kerja banyak yang terserap (BPS DIY, 2014).



Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

**Gambar 1.1.**

Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2014

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung bertambah dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2013 terlihat menurun tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014. Grafik pengangguran pada gambar diatas juga mengalami penurunan

dari tahun ke tahun yang artinya angkatan kerja banyak yang terserap (BPS DIY, 2014).

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja diberbagai lapangan usaha. Berikut tabel jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2011 hingga tahun 2014 (BPS DIY, 2014):

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta (Ribu Jiwa)**

Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
1.Pertanian	431	502	531	496	490
2.Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air	16	16	14	16	16
3.Industri Pengolahan	266	282	251	273	268
4.Bangunan	133	132	104	146	129
5.Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan	480	464	487	505	484
6.Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	68	61	65	68	66
7.Keuangan	50	57	54	73	58
8.Jasa-jasa	352	350	375	374	363
Total	1.798	1.867	1.886	1.956	1.877

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta (2011-2014)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dalam periode tahun tersebut rata-rata pekerja yang terserap di sektor ini sebesar 490 ribu jiwa. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah sektor Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan yang menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 484 ribu jiwa. Rata-rata penyerapan tenaga kerja

terendah berada pada sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air yaitu sebesar 16 ribu jiwa. Dalam periode tersebut penyerapan tenaga kerja senantiasa mengalami kenaikan (BPS DIY, 2014).

Dalam pasar kerja, adanya peningkatan jumlah angkatan kerja menjadikan jumlah penawaran kerja juga semakin meningkat. Namun disisi lain, permintaan tenaga kerja masih kurang tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Adanya selisih antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja ini yang mengakibatkan pengangguran yang dapat dapat menggoyahkan kestabilan ekonomi dan keamanan suatu daerah sehingga kesejahteraan yang diimpikan tidak dapat terwujud (Adi As'har, 2015).

Berikut tabel mengenai pencari kerja serta tenaga kerja yang ditempatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Pencari Kerja dan Penempatannya di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)**

Tahun	Pendaftaran	Penempatan/Penghapusan	Sisa Pendaftaran
2011	86.726	30.237	56.489
2012	87.541	32.410	55.131
2013	89.418	23.593	65.825
2014	80.589	38.342	42.247

Sumber: BPS DIY, 2015

Dari tabel diatas menunjukkan pendaftar pencari kerja mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2013. Tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 80.589 jiwa. Penempatannya bersifat fluktuatif naik turun, tetapi masih belum dapat menyerap seluruh pencari kerja,

sehingga masih banyak sisa pencari kerja yang mendaftar tersebut BPS DIY, 2015).

Pada dimensi masalah ketenagakerjaan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki permasalahan pokok yang ditandai oleh lebih rendahnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia. Dalam situasi seperti ini kesempatan kerja perlu ditumbuhkan dengan laju melebihi pertumbuhan angkatan kerja untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di masa mendatang (Ritonga, 2007).

Dari latar belakang tersebut dapat diambil judul: “Determinan yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam melaksanakan penelitian, agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan mengingat luasnya permasalahan serta adanya keterbatasan kemampuan sumber daya peneliti, maka perlu adanya batasan-batasan agar permasalahan yang diberikan lebih terarah dan mudah dimengerti. Adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PDRB, investasi, dan upah.
2. Data yang digunakan yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2014 yakni terdiri atas:
  - a. Tenaga kerja yang bekerja

- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- c. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- d. Upah Minimum Provinsi (UMP)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta dan uraian diatas khususnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimanakah pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kondisi penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan acuan perumusan dan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber masukan bagi ilmu pengetahuan tambahan yang relevan untuk masyarakat dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian lebih lanjut.